



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2026

**DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI**

2026

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah S.W.T, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2026 ini dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Renja Perubahan Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ini merupakan penjabaran atas Visi dan Misi Gubernur Jambi 2025-2029 dan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Kami menyadari, sangat dimungkinkan dalam penyusunan rancangan akhir Renja Perubahan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ke depan.

Besar harapan kami Program dan Kegiatan yang tersusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi ini dapat terlaksana untuk mewujudkan Jambi MANTAP 2025-2029.
Terima Kasih.

Jambi, Oktober 2025

KEPALA DINAS,



Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19680102 199203 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Dokumen Renja SKPD	7
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN SKPD	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	33
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	43
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	52
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	58
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	58
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah	61
3.3. Program dan Kegiatan	63
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	66
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2026	66
BAB V. PENUTUP	76

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2025 (TRW III) Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	10
Tabel 2.2. Laporan Realisasi Keuangan APBD TRW III Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	23
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2024	28
Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026.....	44
Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Sektor Pertanian Provinsi Jambi Tahun 2026	53
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.....	62
Tabel 3.2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.....	64
Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju 2026.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan di setiap tahun anggaran. Pada tahun 2026 ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2026.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan RAPBD & APBD. Dokumen Renja PD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan di sektor pertanian khususnya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, rencana kerja dan

pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan Rancangan Akhir Renja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu; persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal (Ranwal) Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan musrenbang, perumusan akhir Renja dan penetapan Renja melalui peraturan kepala daerah. Renja tahun 2026 merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Tahun 2025-2029. Penjabaran yang dimaksud, menitikberatkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang ada dalam RPJMD, begitupun dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Prioritas pembangunan tahun 2026 yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan prioritas merupakan upaya pemenuhan pencapaian target tahun kesatu yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) PD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2026 memuat arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jambi untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rancangan Awal Renja tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jambi untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Selanjutnya Rancangan Akhir Renja tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun 2026.

Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari periode kepemimpinan Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 (Februari 2025 – Februari 2029), oleh karena itu dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan penjabaran dari skema RPJMD 2025-

2029 dan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6), memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh PD serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini merupakan tahapan pertama dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2025-2029, yaitu :

**“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

- 1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien,** yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
- 2. Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata,** yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
- 3. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia,** yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2014- 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
20. Peraturean Gubernur No 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam mendukung perwujudan

visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yaitu sebagai dasar bagi seluruh pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, sehingga dapat meningkatkan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

1.4. Sistematika Dokumen Renja SKPD

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2026, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat :

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025 telah terlewati. Berbagai Program dan Kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2025 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan PD tahun lalu dan pencapaian renstra PD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara rinci rekapitulasi evaluasi Rencana Kerja PD tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2025 (TRW III) Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	B	B	B	100	BB		
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengangara (Dokumen)	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100	9 Dokumen	8 Dokumen	89
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100	15 Dokumen	14 Dokumen	93
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan (laporan)	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100	7 Laporan	3 Laporan	43
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	2 Laporan	- Laporan	2 Laporan	- Laporan	-	2 Laporan	- Laporan	-
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan (Laporan)	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Laporan	4 Laporan	80
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	3.864 Org/Bln	3.864 Org/Bln	3.864 Org/Bln	3.864 Org/Bln	100	3.864 Org/Bln	2.903 Org/Bln	75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	7 Dokumen	58
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kepegawaian (Laporan)	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	- Laporan	0
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)	566 Paket	566 Paket	- Paket	- Paket	-	566 Paket	- Paket	-
3.27.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100	7 Dokumen	- Dokumen	0
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	28 Orang	20 Orang	- Orang	- Orang	-	28 Orang	- Orang	-
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Rutinitas Kantor (Laporan)	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100	7 Laporan	7 Laporan	100
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	12 Paket	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	12 Paket	100
3.27.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10 Paket	- Paket	10 Paket	10 Paket	100	10 Paket	- Paket	0
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	- Paket	0
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	- Paket	0
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Prundangundangan yang Disediakan (Dkumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	- Dokumen	-
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	- Laporan	0
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (Unit)	128 Unit	1 Unit	128 Jenis	1 Unit	0,8	128 Jenis	- Jenis	0
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5 Unit	1 Unit	5 Unit	- Unit	-	5 Unit	- Unit	-
3.27.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100 Unit	- Unit	100 Unit	- Unit	-	100 Unit	- Unit	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Jenis)	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100	4 Jenis	4 Jenis	100
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Lapooran	12 Lapooran	12 Lapooran	12 Lapooran	100	12 Lapooran	8 Lapooran	67
3.27.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	8 Laporan	67
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	- Laporan	0
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (Unit)	437 Unit	335 Unit	411 Unit	335 Unit	81,5	437 Unit	154 Unit	35,2
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	375 Unit	325 Unit	350 Unit	350 Unit	100	375 Unit	190 Unit	51
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	12 Unit	10 Unit	11 Unit	2 Unit	18,2	12 Unit	- Unit	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota (%)	21 %	17 %	19 %	17 %	89,4	21 %	13 %	62
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan Koordinasi, Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100	11 Laporan	11 Laporan	100
3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terawasinya dan tersertifikasinya benih tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	133 Sertifikat	110 Sertifikat	121 Sertifikat	106 Sertifikat	87,6	133 Sertifikat	88 Sertifikat	66

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.02.1.02.05	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan Harga (Laporan)	11 Laporan	- Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100	11 Laporan	- Laporan	0
3.27.02.1.02.07	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang Diperbanyak (Batang)						25.000 Batang	- Batang	0,00
3.27.02.1.02.013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang Diperbanyak (Ton)						300 Ton	- Ton	0,00
3.27.02.1.04	Peningkatan ketersediaan dan Mutu/Bibit ternak dan Tanaman Pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi	Meningkatnya ketersediaan benih/bibit ternak dan benih/bibit tanaman pakan ternak yang bermutu (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th.... (%)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.02.1,04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	6 Dokumen	75,0	8 Dokumen	5 Dokumen	63
3 27 02 1.04 04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)	4 Laporan	- Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	3 Laporan	75
3 27 02 1.04 05	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas (Orang)	39 Orang	- Orang	39 Orang	35 Orang	89,7	39 Orang	- Orang	0
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan yang sumbernya dari daerah provinsi lain.	Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100
3.27.02.1,07.02	Pengadaan Hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)	600 Ton	500 Ton	500 Ton	500 Ton	100	600 Ton	167 Ton	28
3.27.02.1,07.04	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)	9.000 Ekor	- Ekor	8.000 Ekor	3.607 Ekor	45,09	9.000 Ekor	687 Ekor	8

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota (%)	17 %	13 %	15 %	13 %	86,6	17 %	12 %	72
3.27.03.1,01	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya penataan Prasarana Pertanian untuk Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis (Dokumen)	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100	11 Dokumen	8 Dokumen	73
3.27.03.1,01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100	7 Dokumen	7 Dokumen	100
3 27 03 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100	11 Dokumen	- Dokumen	-
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100	6 Laporan	4 Laporan	67
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta sarana pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	15 Unit	10 Unit	12 Unit	10 Unit	83,3	15 Unit	- Unit	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th.... (%)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Meningkatnya keswan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan komoditas peternakan strategis di Prov. Jambi (%)	10 %	8 %	9 %	8 %	88,8	10 %	7 %	66
3.27.04.1.01	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	Jumlah wilayah pelayanan kesehatan hewan (Kab /Kota)	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100
3.27.04.1.01.07	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang Mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100	11 Laporan	11 Laporan	100
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukkan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan peredaran obat ternak (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th.... (%)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.04.1.02.07	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	11 Laporan	- Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100	11 Laporan	11 Laporan	100
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Terperiksanya sampel kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (sampel)	2.500 Sampel	2.500 Sampel	2.500 Sampel	2.500 Sampel	100	2.500 Sampel	1.821 Sampel	73
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	18 NKV	- NKV	15 NKV	13 NKV	86,7	18 NKV	13 NKV	72
3.27.04.1.05.03	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor kontrol Veteriner (NKV) [Sertifikat]	15 Sertifikat	- Sertifikat	15 Sertifikat	13 Sertifikat	86,7	15 Sertifikat	13 Sertifikat	87
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (%)	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	35,24 %	29,24 %	32,34 %	29,24 %	90,4	35,24 %	26,00 %	74
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Propinsi	Terkendalinya wilayah yang terdampak serangan OPT, Perubahan Iklim (DPI), Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	150 Hektar	125 Hektar	125 Hektar	113 Hektar	90,4	150 Hektar	109 Hektar	73
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN (%)	Penerbitan Izin Usaha Pertanian di Kabupaten / kota	10 %	10 %	10 %	10 %	100	10 %	10 %	100
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Kabupaten/Kota (Laporan)	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	- Laporan	0
3.27.06.1.01.01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	- Laporan	0
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Kelembagaan Pertanian yang meningkat kapasitasnya	2 %	2 %	2 %	2 %	100	2 %	2 %	100
3.27.07.1.01	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Tersedianya jumlah penyuluh pertanian yang terlatih (Orang)	125 Orang	110 Orang	115 Orang	- Orang	-	125 Orang	- Orang	0
3.27.07.1.01.04	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	60 Orang	50 Orang	55 Orang	35 Orang	63,64	60 Orang	- Orang	0
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya penerapan penyuluhan pertanian di Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n -2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d th..... (%)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TRW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	100
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	35 Kelompok	25 Kelompok	30 Kelompok	25 Kelompok	83,3	35 Kelompok	25 Kelompok	71
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ekonomi pertanian berbasis kawasan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi petani/peternak (Kab/Kota)	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100
3.27.07.1.03.06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	11 Unit	- Unit	11 Unit	7 Unit	63,64	11 Unit	10 Unit	91

Dari Tabel 2.1. evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi terhadap Pencapaian Target

Dari tabel 2.1 dapat diketahui bahwa dalam rangka pencapaian rencana target yang ditetapkan Rencana kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2024 dilaksanakan program/kegiatan sebanyak 7 program 21 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Dengan reliasasi pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan mencapai 93,6 %. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain capaian target kinerja hanya sebesar 45,09 % dari target 8.000 ekor terealisasi 3.607, hal ini disebabkan karena terbatasnya ketersediaan anggaran pada tahun 2024, namun dari target berdasarkan DPA untuk sub kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain sudah mencapai target sebesar 97,86 % dari target penyediaan ternak sebanyak 3.607 ekor

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Dalam tahun anggaran 2024 aspek dukungan dana yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional sebesar Rp 68.949.837.451,-. Realisasi Belanja sebesar Rp 64.177.101.753,- atau sebesar 93,08 % dengan realisasi fisik sebesar 97,35 %. Tidak tercapai realisasi sebesar 100 % di sebabkan diantaranya karena adanya sisa dari belanja pegawai sebesar 40,31 % dan adanya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang belum terlaksana sebesar 15,74 %.

Tabel 2.2. Laporan Realisasi Keuangan APBD TRW III Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		38.513.603.083	34.276.129.381	89,00	97,00	4.237.473.702
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		461.285.797	415.253.900	90,02	91,13	46.031.897
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	271.123.920	266.772.800	98,40	100,00	4.351.120
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.161.877	148.481.100	78,08	78,50	41.680.777
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		36.135.772.001	32.190.450.342	89,08	97,51	3.945.321.659
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.447.646.001	31.506.266.342	88,88	97,46	3.941.379.659
2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	688.126.000	684.184.000	99,43	100,00	3.942.000
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		136.203.288	110.021.838	80,78	100,00	26.181.450
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.289.590	35.184.590	99,70	100,00	105.000
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.913.698	74.837.248	74,16	100,00	26.076.450
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.291.982.620	1.187.084.720	91,88	91,98	104.897.900
1	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	872.690.046	769.062.176	88,13	88,13	103.627.870
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	419.292.574	418.022.544	99,70	100,00	1.270.030

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		488.359.377	373.318.581	76,44	76,68	115.040.796
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	388.359.377	274.484.426	70,68	70,68	113.874.951
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	98.834.155	98,83	100,00	1.165.845
II. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		13.322.550.000	12.976.339.596	97,40	98,93	346.210.404
1. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		5.588.000.000	5.446.184.886	97,46	99,99	141.815.114
1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	5.496.066.000	5.356.094.995	97,45	100,00	139.971.005
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	91.934.000	90.089.891	97,99	99,12	1.844.109
2. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		942.000.000	852.474.981	90,50	92,04	89.525.019
1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	296.000.000	252.598.200	85,34	90,26	43.401.800
2	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	60.711.500	59.613.279	98,19	98,19	1.098.221
3	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	585.288.500	540.263.502	92,31	92,31	45.024.998

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
3. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih /Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi		1.078.000.000	1.075.517.400	99,77	100,00	2.482.600
1	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi	86.000.000	85.340.600	99,23	100,00	659.400
2	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan ternak , Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	992.000.000	990.176.800	99,82	100,00	1.823.200
4. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		5.714.550.000	5.602.162.329	98,03	98,84	112.387.671
1	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	392.800.000	326.293.454	83,07	83,07	66.506.546
2	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	5.321.750.000	5.275.868.875	99,14	100,00	45.881.125
III. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		4.245.033.414	4.192.848.008	98,77	100,00	52.185.406
1. Penataan Prasarana Pertanian		4.245.033.414	4.192.848.008	98,77	100,00	52.185.406
1	Perencanaan Pengembangan Prasarana,Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.869.291.384	1.837.897.944	98,32	100,00	31.393.440
2	Koordinasi,Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2.375.742.030	2.354.950.064	99,12	100,00	20.791.966

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
IV. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		1.265.609.001	1.198.327.984	94,68	96,73	67.281.017
1. Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		542.222.000	518.123.106	95,56	100,00	24.098.894
1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	542.222.000	518.123.106	95,56	100,00	24.098.894
2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		126.303.700	126.242.700	99,95	100,00	61.000
1	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	126.303.700	126.242.700	99,95	100,00	61.000
3. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikat zona/kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		464.947.001	425.015.328	91,41	91,41	39.931.673
1	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	464.947.001	425.015.328	91,41	91,41	39.931.673
4. Kesejahteraan Hewan		132.136.300	128.946.850	97,59	98,91	3.189.450
1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor kontrol Veteriner (NKV)	132.136.300	128.946.850	97,59	98,91	3.189.450
V. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		663.285.400	642.094.365	96,81	100,00	21.191.035
1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		663.285.400	642.094.365	96,81	100,00	21.191.035
1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	624.720.400	603.843.365	96,66	100,00	20.877.035
2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	38.565.000	38.251.000	99,19	100,00	314.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
VI. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		461.880.100	447.539.400	96,90	100,00	14.340.700
1. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		420.240.300	407.894.600	97,06	99,99	12.345.700
1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	74.584.800	73.354.800	98,35	99,95	1.230.000
2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	345.655.500	334.539.800	96,78	100,00	11.115.700
2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		41.639.800	39.644.800	95,21	100,00	1.995.000
1	Pendampingan dan Pengawasan korporasi petani	41.639.800	39.644.800	95,21	100,00	1.995.000
TOTAL		58.471.960.998	53.733.278.734	91,90	97,71	4.738.682.264

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi pada tahun 2024 diukur melalui beberapa parameter yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK). Data IKK Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2024 dapat dilihat di Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2024

NO.	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025*	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Pertanian											
1	Jumlah Produksi Padi (Ton GKG)	V	282.427	283.839	285.258	286.685	288.118	281.022	367.791	285.258	286.685	
2	Jumlah Produksi Jagung (Ton JPK KA 14 %)	V	10.557	10.584	10.610	10.637	10.663	10.531	26.738	10.610	10.637	
3	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai (KW)	V	1.726.573	1.738.659	1.750.829	1.763.085	1.775.427	1.714.571	2.146.288	1.750.829	1.763.085	
4	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Bawang Merah (KW)	V	123.122	123.369	123.615	123.863	124.110	122.876	218.559	123.615	123.863	
5	Populasi Sapi (Ekor)	V	107.576	108.652	109.738	110.836	111.944	112.906	114.060	109.738	110.836	
6	Populasi Kambing (Ekor)	V	115.137	115.713	116.291	116.873	117.457	119.766	125.248	116.291	116.873	
7	Produksi Daging Sapi (Ton)	V	4.407	4.437	4.469	4.500	4.531	4.524,05	5.197	4.469	4.500	
8	Produksi Daging Kambing (Ton)	V	496	500	503	507	510	468,01	414	503	507	
9	Produksi Daging Ayam (Ton)	V	57.827	58.116	58.406	58.698	58.992	58.581,01	64.323	58.406	58.698	
10	Produksi Telur (Ton)	V	40.522	40.603	40.684	40.765	40.847	39.113,83	41.692	40.684	40.765	
11	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	V	75	77	78	80	82	87,5	89,58	78	80	
12	Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (%)	V	54,06	54,56	55,36	56,36	57,66	53,76	54,08	55,36	56,36	

NO.	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025*	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (%)	V	84,14	84,84	85,84	87,14	88,64	83,74	84,15	85,84	87,14	
14	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura (%)	V	14,15	14,55	15,05	15,75	16,55	13,95	-	15,05	15,75	
15	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan (%)	V	12,56	13,06	13,76	14,66	15,66	12,26	12,58	13,76	14,66	

Ket. : * Angka Sementara

Produksi hasil pertanian merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor lingkungan, genetik, agronomi, sosial-ekonomi, dan biotik. Untuk meningkatkan produksi secara berkelanjutan, perlu dilakukan pendekatan terpadu yang mencakup pemilihan varietas unggul, penerapan teknologi pertanian modern, pengelolaan lahan yang bijak, serta dukungan kebijakan pemerintah. Dengan pengelolaan yang optimal, produksi tanaman dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan peningkatan populasi.

Pada tahun 2024, produksi Padi yang terbanyak masih di kabupaten Kerinci dengan jumlah produksi 86.791 Ton atau 30,88% dari total produksi di Provinsi Jambi. Disusul Kota Sungai Penuh dengan jumlah produksi 31.977 Ton atau 11,38% dari total produksi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah produksi 27.832 Ton atau 9,90% dari total produksi di Provinsi Jambi. Untuk produksi Jagung, yang terbanyak ada di Kabupaten Kerinci dengan jumlah produksi 2.139 Ton atau 20,31% dari total produksi di Provinsi Jambi. Disusul Kabupaten Tebo dengan jumlah produksi 1.899 Ton atau 18,04% dari total produksi dan Kabupaten Merangin dengan jumlah produksi 1.771 Ton atau 16,82% dari total produksi di Provinsi Jambi.

Pada tahun 2024, produksi bawang merah yang terbesar di Kabupaten Kerinci dengan jumlah produksi 109.870 kuintal atau 89,41 % dari total produksi di Provinsi Jambi, disusul Kota Sungai Penuh dengan produksi 4.260 kuintal atau 3,47 % dari total produksi dan Kabupaten Tebo dengan jumlah produksi 3.442 kuintal atau 2,80 % dari total produksi di Provinsi Jambi. Tingginya angka produksi ini juga dipengaruhi oleh kondisi lahan yang baik dan kondisi iklim yang juga sesuai. Untuk produksi cabe besar, yang terbanyak di Kabupaten Kerinci dengan jumlah produksi 1.623.633 kuintal atau 94,70 % dari total produksi di Provinsi Jambi disusul Kabupaten Merangin dengan produksi 44.205 kuintal atau 2,58 % dari total produksi dan Kabupaten Batanghari dengan jumlah produksi 17.912 kuintal atau 1,04 % dari total produksi di Provinsi Jambi.

Populasi ternak tahun 2024 menunjukkan data yang bervariasi tergantung wilayah dan jenis ternak. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023), ternak Sapi dan Kerbau pada 1 Mei 2023 di Provinsi Jambi dengan jumlah 130.752 ekor. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 6,3 persen dengan jumlah 138.985 ekor. Populasi sapi terbanyak masih ditempati oleh Kabupaten Tebo yaitu sebanyak 23.060 ekor atau 20,42 persen dari total populasi sapi di Provinsi Jambi dilanjutkan oleh Kabupaten Bungo sebanyak 22.919 ekor atau 20,30 persen dan diurutkan ketiga yaitu Kabupaten Merangin yaitu sebanyak 14.121 ekor atau 12,51 persen dari total populasi sapi.

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023), populasi ternak Kambing dan Domba sebanyak 117.478 ekor. Untuk tahun 2024 populasi ternak Kambing dan Domba mengalami kenaikan sebesar 6,73 persen dengan jumlah 125.382 ekor. Populasi Kambing yang terbanyak ada di kabupaten Merangin dengan jumlah populasi 19.581 ekor atau 16,35 persen dari total populasi di Provinsi Jambi. Disusul Kabupaten Muaro Jambi dengan populasi 19.352 ekor atau 16,16 persen dari total populasi dan disusul Kabupaten Tebo dengan jumlah populasi 18.005 ekor atau 15,03 persen dari total populasi di Provinsi Jambi.

1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:

a. Terjadi Penurunan Kapasitas Sumber Daya Alam

Kapasitas Sumber Daya Alam yang potensial untuk lahan pertanian pangan dan hortikultura cenderung menurun baik luas maupun kualitasnya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus berlanjut dengan laju yang cenderung meningkat (terutama di daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur), begitu pula di daerah kabupaten lain terjadi pengurangan luas lahan pertanian akibat peruntukan bangunan, sementara upaya perluasan areal baru melalui cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat belum seimbang karena sangat kecil dan pembangunannya memerlukan investasi yang cukup besar disamping kualitasnya yang belum sebaik lahan sebelumnya. Alih fungsi tersebut banyak beralih kepengusahaan lahan pertanian bukan sawah sebagian besar untuk sektor perkebunan (sawit) dan baru-baru ini alih fungsi lahan menjadi lebih besar terhadap aktivitas tambang ilegal (Illegal Mining).

Disamping jumlahnya yang menyusut, juga terjadi kemerosotan tingkat kesuburan lahan akibat penggunaan lahan yang terus menerus yang tidak diikuti dengan pengembalian kesuburan lahan melalui penambahan pupuk organik. Sumber air Irigasi di Jambi umumnya juga sangat terbatas, dan hanya ada di beberapa Kabupaten (Kerinci, Merangin, sarolangun, Bungo, Tebo Tanjung Jabung Timur & Tanjab Barat) dengan cakupan yang terbatas untuk melaksanakan intensifikasi pertanian melalui peningkatan Indeks pertanaman dan Penerapan System Rice Intensification (SRI), sehingga sering kesulitan. Begitu pula yang terjadi di Balai Benih Induk (BBI), sumber air yang ada hanyalah waduk buatan dengan skala kecil, sehingga seringkali terjadi kekeringan pada saat kemarau mulai tiba.

b. Terjadinya Perubahan Iklim

Pada tahun 2023, terjadinya kekeringan dampak dari fenomena elnino diperparah dengan dampak kebakaran hutan dan banjir yang cukup tinggi dan di Provinsi Jambi dan pada tahun 2024 terjadi kekeringan yang ekstrim. Suhu yang terlalu panas dan berkurangnya ketersediaan air akan menghambat produktivitas pertanian. Perubahan iklim juga akan menyebabkan perubahan masa tanam dan panen ataupun menyebabkan munculnya hama dan wabah penyakit pada tanaman yang sebelumnya tidak ada. Ancaman banjir yang semakin sering terjadi pada lahan sawah juga merupakan salah satu dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Hal ini menyebabkan berkurangnya luas areal panen dan produksi padi. Dampak pergeseran musim tanam mengakibatkan jadwal tanam akan terganggu yang mengakibatkan menurunnya angka produksi dan bahkan kegagalan panen.

c. Masih beragamnya produksi tanaman pangan yang dihasilkan petani

Perkembangan inovasi teknologi terus berjalan dengan cepat dan cenderung mengalami perubahan setiap saat, begitu pula di sub sektor tanaman pangan. Sekarang sudah ada berbagai jenis varietas benih padi yang dihasilkan oleh Balitpa. Namun demikian, di daerah masih belum dikembangkan, karena memerlukan uji adaptasi. Hal ini karena relatif masih lemahnya kelembagaan yang ada di tingkat lapangan, disamping itu untuk penerapan teknologi tersebut membutuhkan saprodi yang sesuai dengan anjuran.

Lambatnya inovasi dan penerapan teknologi baru mengakibatkan produktivitas usaha tani belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- a) Terbatasnya modal petani untuk pembelian saprodi sehingga teknologi yang diaplikasikan pada pertanaman petani belum maksimal.

- b) Masih relatif rendahnya penggunaan teknologi sesuai rekomendasi. Hal ini karena petani masih ada yang belum meyakini teknologi yang dianjurkan.
- c) Masih adanya petani yang mempergunakan benih kurang bermutu, yang telah mengalami degradasi. Biasanya ini terjadi karena penggunaan benih hasil panen sendiri yang terus menerus tanpa disertifikasi ulang. Disamping itu dalam memproduksi benih terkendala oleh :
- Sarana dan prasarana prosesing pada penangkar belum memadai sehingga dalam musim penghujan kadar air benih hasil penangkaran tidak dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
 - Minat penangkar dalam memproduksi benih buah-buahan masih rendah.
 - Mitra kerja antara penangkar dengan pihak swasta belum optimal.
 - Peralatan Laboratorium ada yang rusak dan belum diperbaiki dan kelengkapan peralatan khususnya untuk uji kesehatan benih yang belum lengkap.
 - Pada pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar memiliki kendala dalam penyediaan benih dari pusat, sehingga jadwal pelaksanaan di lapangan mengalami penundaan.
 - Masih kurangnya pemahaman produsen / pedagang benih untuk menerapkan Undang-undang No. 12 Tahun 1992 dan PP No. 44 1995.
- d) Masih terbatasnya kemampuan petani dalam menerapkan teknologi di bidang perlindungan tanaman untuk meningkatkan kualitas dan pengamanan produksi tanaman Pangan.
- e) Masih Rendahnya kemampuan/daya beli petani khususnya tanaman pangan untuk membeli benih Unggul bermutu dan bersertifikat secara tunai.

d. Masih Berfluktuatifnya Produktivitas dan Produksi Tanaman Hortikultura yang dihasilkan

Tanaman hortikultura, khususnya buah – buahan produktivitas dan produksinya relatif tidak stabil setiap tahun. Begitu juga sayur- sayuran, pada saat–saat tertentu melimpah dipasaran dan diwaktu yang lain terjadi kekurangan, yang menyebabkan harga berfluktuatif pula. Disamping itu kualitas yang dihasilkan juga masih ada yang tidak seragam. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya.

- Penerapan GAP dan SOP belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petani komoditas buah-buahan dan sayur – sayuran sehingga tidak dapat memenuhi standar ekspor.
- Produksi sayuran organik belum dapat berjalan secara efektif dan optimal yang mengakibatkan masih sulitnya pemasaran walaupun telah ditetapkan dengan kategori sayuran prima 3.
- Permintaan benih bermutu khususnya komoditi kentang terus meningkat, namun demikian belum dapat dipenuhi oleh industri perbenihan dan penangkar benih secara optimal.

e. Relatif Masih Terbatasnya Managerial Usaha Tani dan Kualitas Sumber daya yang relatif masih rendah.

Pengelolaan usaha tani petani saat ini masih dilakukan secara tradisional, dengan skala usaha kecil – kecil dan merupakan usaha konvensional, kegiatannya cenderung pada upaya produksi dan belum berdasarkan perhitungan untung rugi dan daya serap serta jangkauan pemasaran yang mengakibatkan efisiensi dan efektivitas produksi masih rendah. Kondisi demikian mengakibatkan insentif yang diterima petani belum optimal sesuai dengan yang diharapkan.

Disamping itu rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian. Disadari saat ini tingkat pendidikan dan keterampilan petani masih ada yang rendah. Rendahnya mentalitas petani antara lain dicirikan oleh usaha pertanian yang

berorientasi jangka pendek, mengejar keuntungan sesaat, serta masih ada yang belum memiliki wawasan bisnis luas. Selain itu banyak petani menjadi sangat tergantung pada bantuan/pemberian pemerintah. Keterampilan petani yang rendah terkait dengan rendahnya pendidikan dan kurang dikembangkannya kearifan lokal (indigenous knowledge).

Relatif masih terbatasnya managerial Usaha tani dan Kualitas Sumberdaya yang relatif masih rendah, didukung oleh antara lain :

- Rendahnya pemahaman petugas, petani dan pelaku agribisnis dalam kualitas dan standarisasi mutu pasar lokal dan international.
- Masih relatif Kurangnya jumlah tenaga pengawas benih dibandingkan dengan cakupan luas penangkaran benih yang ada di Kabupaten / Kota.

f. Rendahnya Nilai Tambah Produk.

Petani di Jambi umumnya hanya melakukan kegiatan usahatani secara parsial dan terbatas hanya sampai panen dan masih relative jarang yang melakukan pengolahan lanjutan dari hasil usahatani tersebut, sehingga nilai tambah dari kegiatan usaha tani masih kecil. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi rumah tangga pertanian dalam mendukung berkembangnya sektor industri pengolahan di daerah belum berkembang dengan baik. Beberapa hal lain yang menyebabkan rendahnya nilai tambah produk tersebut adalah :

- a. Masih kurangnya kebijakan yang mendorong pengembangan industri pedesaan berbasis bahan olahan.
- b. Keterbatasan informasi dan penerapan teknologi pasca panen.

g. Sistem Alih Teknologi Masih Lemah dan belum Tepat Sasaran.

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih terlihat lemah karena diseminasi teknologi baru (invention) dan pengembanganteknologi yang sudah ada (innovation) hanya terbatas dan belum menyebar pada semua tingkatan petani. Masih Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal antara lain : Penerapan teknologi pra panen sampai dengan

pasca panen hanya terlaksana pada daerah yang terdani, sedangkan yang lain belum. Pada daerah – daerah tertentu, jumlah penggunaan benih masih terlalu besar dari semestinya sehingga mubajir dan dilain pihak kegiatan penanganan pasca panen belum dilaksanakan secara baik dan benar menurut GHP (Good Handling Procedure) yang menyebabkan kehilangan hasil masih cukup tinggi.

Disamping itu, masih ditemui keterlambatan penyaluran benih ke lapangan sehingga petani tidak dapat menggunakan bantuan benih tersebut karena petani telah terlanjur tanam menggunakan benih yang ada pada petani.

h. Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Usaha Permodalan.

Akses petani terhadap modal, informasi, dan lahan sangat penting dalam peningkatan kinerja usahatani. Usaha pertanian dihadapkan kepada keterbatasan akses terhadap layanan usaha, terutama permodalan. Ketidakmampuan masyarakat perdesaan mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal selama ini disebabkan oleh : (1) keberadaan lembaga keuangan formal di perdesaan masih sangat terbatas, (2) prosedur yang berlaku dan persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan formal yang ada masih dinilai sulit oleh masyarakat perdesaan, dan (3) petani tidak mampu mengakses kredit dengan aturan dan suku bunga seperti yang diterapkan pada usaha komersial lain (di luar agribisnis).

Kurangnya kemampuan modal yang dimiliki petani dan pelaku agribisnis, menyebabkan petani minim dalam penggunaan sarana produksi pendukung seperti pupuk dan pestisida, sehingga dampak peningkatannya produktivitasnya tidak signifikan.

i. Sarana dan prasarana masih sangat terbatas

Sarana dan prasarana dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum sepenuhnya mendukung dan sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh :

- a. Balai Benih Induk (BBI) Padi , BBI palawija dan BBI kentang sebagai Lembaga penyediaan benih sumber belum sepenuhnya dapat menyediakan benih, karena :
- Saat ini Sumber air yang ada sangat terbatas, mengakibatkan kebutuhan air pada saat tanam tidak dapat dipenuhi secara optimal.
 - Peralatan kerja dari pengolahan sampai pasca panen dan peralatan penunjang lainnya sebagian besar sudah mengalami kerusakan.
 - Prasarana gudang, jalan usaha tani dan saluran irigasi kondisinya sudah kurang memadai
 - Produktivitas lahan mengalami penurunan sebagai akibat penggunaan lahan yang terus-menerus dan belum diimbangi dengan perbaikan lahan.
 - Masih sulitnya mendapatkan benih sumber BS dan BD.
- b. Penggunaan Sarana produksi belum memenuhi kriteria 5 tepat : tepat jenis, tepat waktu dan tepat jumlah, tepat mutu dan harga yang terjangkau.
- c. Prasarana pertanian yang ada di tingkat petani sudah banyak yang rusak, dan petani belum sanggup membiayai untuk perbaikan.
- d. Petani belum mempunyai kesadaran dalam memelihara sarana yang ada misalnya jaringan irigasi, jaringan jalan usahatani dan bantuan alat dan mesin pertanian.
- e. Masih lemahnya infrastruktur pasca panen dan kelembagaan pemasaran yang belum efektif.

j. Kelembagaan Pertanian belum berkembang dengan baik

Sejalan dengan semangat reformasi maka fungsi kelembagaan menjadi lebih penting terutama lembaga pelayanan sehingga petani mampu melaksanakan usahanya secara maksimal. Jumlah Kelompok tani yang pasti saat ini sulit diketahui. Jumlah penyuluh pertanian yang pindah tugas ke struktural, pensiun atau meninggal sudah mulai teratasi melalui penambahan tenaga PPL melalui THL-TB PPL, THL – TB POPT.

Disamping itu kelembagaan UPJA maupun KUPJA belum berkembang sesuai yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh :

- a. Semakin menurunnya tingkat keaktifan dan jumlah UPJA yang ada.
- b. Umumnya penempatan alsin yang ada baik dari pengadaan pusat, provinsi, kabupaten ataupun dari instansi terkait tidak pada kelembagaan UPJA sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya hanya ditingkat kelompok tani dan menjadi milik kelompok. Dengan demikian bantuan alsin yang ada tidak efisien dan tidak berkembang.
- c. Masih banyak petani/kelompok tani/UPJA yang keberatan dengan sistim Bantuan Uang Muka Alsin (BUMA) yang disediakan dari dana APBN karena sudah terbiasa dengan menerima bantuan alsin secara gratis.

k. Masih Kurangnya Kesadaran Terhadap Kelestarian Lingkungan

Lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan agribisnis karena menyangkut kelanjutan usaha agribisnis tersebut. Beberapa metode usaha tani yang diterapkan ada yang belum memenuhi aspek kelestarian lingkungan antara lain :

- a. Masih ditemui adanya residu pestisida pada produk tanaman Pangan dan Hortikultura, terutama pada tanaman sayuran sebagai dampak dari penggunaan pestisida yang berlebihan.
- b. Penggunaan pestisida yang berlebihan (di atas ambang batas). Sehingga menyebabkan matinya musuh – musuh alami, disamping residu pestisida yang masih tinggi pada hasil produksi hortikultura.
- c. Metode konservasi belum diterapkan terutama pada pertanaman hortikultura (kentang).
- d. Pola – pola usaha tani secara terpadu antara pertanian pangan / hortikultura dan peternakan belum diterapkan secara baik.

l. Rantai Tataniaga yang Panjang dan Sistem Pemasaran Belum Optimal

Rantai pemasaran yang panjang berakar dari kondisi infrastruktur perdesaan yang kurang mendukung seperti : ketersediaan informasi pasar,

sarana transportasi dan jalan desa. Disamping itu, kemampuan petani terbatas dalam menyimpan produknya, sehingga sering kali hasil panen harus segera dijual sesaat sesudah panen.

Disamping masih lemahnya infrastruktur pasca panen, kelembagaan pemasaran juga belum efektif. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya dan kebijakan kemitraan, dana talangan, pasar petani, temu usaha/bisnis dan pemberdayaan petugas informasi pasar dimana sebagai program mengatasi kekurangan pasokan pada musim tertentu atau over produksi pada musim panen raya.

Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci, yang umumnya belum memberikan hasil maksimal. Upaya pemerintah memberikan jaminan harga terkendala oleh dana dan kemampuan yang optimal. Kebijakan promosi yang telah diterapkan selama ini perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan yang lebih konkrit.

m. Usaha Peternakan yang bersifat Subsiten dan Rendahnya Partisipasi Kelembagaan Peternak.

Pola pengelolaan usaha peternakan oleh rumah tangga masih sederhana dengan skala kepemilikan yang kecil dan bersifat sambilan, khususnya untuk usaha ternak besar dan kecil. Hampir 95% juta rumah tangga peternak tinggal di pedesaan dan tersebar diberbagai wilayah dengan orientasinya masih peningkatan produksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dengan manajemen atau sistem pngelolaan korporasi peternak yang memiliki dimensi strategis dalam pengembangan kawasan peternakan karena dibentuk dari, oleh, dan untuk peternak. Rendanya partisipasi peternak yang mengikuti bimbingan penyuluhan usaha peternakan terkait pengolahan hasil produksi, pengobatan ternak dan penyusunan ransum merupakan informasi yang paling dibutuhkan oleh peternak.

n. Keterbatasan Lahan untuk Subsektor Peternakan

Permasalahan yang dihadapi subsektor peternakan adalah kepastian lahan dan semakin berkurangnya lahan peternakan karena kebutuhan lahan sektor pertanian lainnya lebih diutamakan. Tidak semua daerah dalam Rencana Tata Ruang Daerah menetapkan adanya lahan untuk pengembangan usaha peternakan termasuk penyediaan padang gembala untuk penyediaan pakan dan pelayanan teknis. Selain itu, sebagian besar usaha peternakan merupakan skala rumah tangga dan lokasinya disekitar rumah, sehingga diperlukan pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi.

Tugas pokok Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan yang diperintahkan Kepada Daerah Provinsi sesuai peraturan yang berlaku. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas meliputi urusan bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan disajikan pada tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Urusan SKPD

No	Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	Permasalahan
1	Perumusan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.	Perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan (perencanaan dan pelaksanaan) masih kurang optimal dikarenakan Tugas dan fungsi yang terlalu besar dan luas dengan struktur organisasi yang padat sehingga kurang terpadu antar bidang dalam perumusan kebijakan akibat masih adanya egosektoral dan kepentingan yang tidak sejalan.
2	Penyelenggaraan urusan bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	1. Kebutuhan pangan semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk, sementara lahan semakin berkurang. 2. Komoditi hortikultura memiliki sifat yang tidak tahan lama dalam penyimpanan tetapi memiliki resiko budidaya yang tinggi. 3. Daya saing komoditi tanaman pangan dan hortikultura yang rendah. 4. Prasarana dan sarana pertanian yang belum menjamin aksesibilitas 5. Kurangnya kesadaran petani dalam menggunakan benih bermutu. 6. Kurangnya ketersediaan penyuluh di lapangan. 7. Kurangnya SDM kelembagaan petani. 8. Rendahnya ketersediaan bibit ternak berkualitas di masyarakat. 9. Kurangnya ketersediaan vaksin dan obat-obatan hewan ternak. 10. Tingginya resiko penularan penyakit hewan.
3	Pembinaan dan pelaksanaan tugas	Kurangnya keterampilan aparat, keterbatasan pelaksana teknis lapangan.

1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penelaahan dan review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan tujuan agar program/kegiatan yang disusun Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi selaras dengan rencana program/kegiatan dan prioritas pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2026. Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah sehingga terjadi Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2026 merupakan langkah awal Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2026 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2026 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Provinsi Jambi.

Secara lengkap dan rinci, review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi disajikan pada Tabel 2.4

Tabel 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				56.255.110.998	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				46.161.785.245	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS	Predikat AKIP Perangkat Daerah		A	38.398.269.635	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS	Predikat AKIP Perangkat Daerah		BB	32.698.805.460	
							Inderks kepuasan masyarakat (indeks)		82		
							Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)		71,5		
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengangara (Dokumen)	Kota Jambi		503.662.604	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengawasan, Penyediaan, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Capaian Kinerja dan Evaluasi Perangkat Daerah (Dokumen)	Kota Jambi	17	326.695.191	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		8	271.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		8	208.695.191	
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		4	232.662.604	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		4	118.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan (Laporan)	Kota Jambi		36.152.022.001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Meningkatnya Pengawasan, Pelayanan dan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah (Dokumen)	Kota Jambi	2	29.717.021.691	
							2. Meningkatnya Pengawasan dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Perangkat Daerah (Dokumen)	Kota Jambi	2	928.459.200	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/buln)		232	35.447.646.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/buln)		232	29.717.021.691	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		12	704.376.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		1	928.459.200	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Rutinitas Kantor (Laporan)	Kota Jambi		133.839.590	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Meningkatnya Pengawasan dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kota Jambi	2	29.046.550	
							2. Meningkatnya Pengawasan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah (Dokumen)	Kota Jambi	2	326.809.954	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		12	33.839.590	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		12	29.046.550	
1.3.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12	326.809.954	
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Jenis)	Kota Jambi		1.226.677.440	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatkan Pengawasan, Pelayanan, dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik Perangkat Daerah (Dokumen)	Kota Jambi	2	846.050.046	
							2. Meningkatkan Pengawasan, Pelayanan, dan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kota Jambi	2	429.472.828	
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	807.350.046	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	846.050.046	
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	419.327.394	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	429.472.828	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (Unit)	Kota Jambi		382.068.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatnya Pengawasan dan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Perangkat Daerah (Dokumen)	Kota Jambi	2	95.250.000	
							3. Meningkatnya Pengawasan dan Pemeliharaan Gedung Perangkat Daerah (Dokumen)	Kota Jambi	2		
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkn Pajaknya (unit)		148	332.068.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkn Pajaknya (unit)		148	95.250.000	
1.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)		2	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)		2	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota (%)		23	13.454.842.660	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		0,38	382.600.000	
							2. Persentase Peningkatan Produksi hortikultura		0,45	696.800.000	
							3. Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		0,6	4.695.280.480	
							4. Persentase Peningkatan Populasi Ternak		0,8		
							5. Persentase Ketersediaan sarana pertanian		50	1.940.395.600	
							6. Persentase Peningkatan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai standard		17	353.600.000	
							7. Persentase Ketersediaan Benih Sumber Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat		55	663.754.400	
							8. Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak dan Pengolahan Lahan HPT Berkualitas		10	711.654.400	
2.1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di 11 kab/kota	Provinsi Jambi		6.133.820.000	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1. Meningkatkan pengawasan, penyediaan dan sebaran pupuk dan pestisida (dokumen)	Provinsi Jambi	2	179.348.600	
							2. Meningkatkan pengawasan penyediaan dan sebaran alat dan mesin pertanian (dokumen)	Provinsi Jambi	2	1.761.047.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3. Meningkatnya pengawasan, penyediaan dan sebaran sarana pendukung produksi tanaman pangan (dokumen)	Provinsi Jambi	2	283.400.000	
							4. Meningkatnya pengawasan, penyediaan dan sebaran sarana pendukung produksi hortikultura (dokumen)	Provinsi Jambi	2	696.800.000	
							5. Meningkatnya pengawasan, penyediaan dan sebaran sarana alat pengolah dan pasca panen hasil pertanian (dokumen)	Provinsi Jambi	2	99.200.000	
2.1.1	Pengawasan sebaran pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pndukung Pertanian (Laporan)		11	4.300.000.000	Pengawasan sebaran pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pndukung Pertanian (Laporan)		11	1.940.395.600	
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen)		3	1.833.820.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen)		3	1.079.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terawasinya dan tersertifikasinya benih tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu (Kab/Kota)	Provinsi Jambi		1.140.022.660	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1. Meningkatnya pengawasan peredaran Benih/Bibit Bersertifikat TPH (dokumen)	Provinsi Jambi	2	95.000.000	
							2. Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Benih tanaman pangan dan hortikultura (dokumen)	Provinsi Jambi	2	258.600.000	
							4. Meningkatnya pengawasan dan penyediaan benih tanaman pangan (dokumen)	Provinsi Jambi	2	596.149.550	
							5. Meningkatnya pengawasan dan penyediaan benih tanaman hortikultura (dokumen)	Provinsi Jambi	2	67.604.850	
2.2.1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Srtifikat)		150	350.000.000	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Srtifikat)		150	353.600.000	
2.2.2	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang Diperbanyak (Batang)		11.000	60.703.500	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang Diperbanyak (Batang)		11.000	67.604.850	
2.2.3	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang Diperbanyak (Ton)		810	579.319.160	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang Diperbanyak (Ton)		810	596.149.550	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	Peningkatan ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit ternak dan Tanaman Pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi	Meningkatnya ketersediaan benih/bibit ternak dan benih/bibit tanaman pakan ternak yang bermutu (Kab/Kota)	Provinsi Jambi		767.000.000	Peningkatan ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit ternak dan Tanaman Pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi	1. Meningkatnya pengawasan dan pelaksanaan pembibitan ternak (dokumen)	Provinsi Jambi	2	204.506.200	
							2. Meningkatnya pengawasan dan penyediaan sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (dokumen)	Provinsi Jambi	2	507.148.200	
2.3.1	Pemberian bimbingan peningkatan produksi benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dkumen)		0		Pemberian bimbingan peningkatan produksi benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi			-	-	
2.3.2	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)		12	767.000.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)		11	711.654.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak (Laporan)			1.000.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pengawasan, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak (dokumen)		2	-	
2.4.1	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (Laporan)		12	1.000.000.000	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			-	-	
2.5	Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan yang sumbernya dari daerah provinsi lain.	Tersedianya pakan ternak yang berkualitas (11 Kab/Kota)	Provinsi Jambi	11	4.414.000.000	Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan yang sumbernya dari daerah provinsi lain.	1. Meningkatnya pengawasan, penyediaan dan sebaran Bibit ternak yang berkualitas (dokumen)	Provinsi Jambi	2	4.522.892.400	
							2. Meningkatnya pengawasan, penyediaan dan sebaran Bibit hijauan pakan ternak yang berkualitas (dokumen)	Provinsi Jambi	2	172.388.080	
2.5.1	Pengadaan Hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)		750	392.800.000	Pengadaan Hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)		100	172.388.080	
2.5.2	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)		10.000	4.021.200.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)		1.065	4.522.892.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota (%)		19	2.204.655.350	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B		61	100.865.600	
							2. Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung		15	1.870.031.985	
							3. Persentase jumlah unit usaha pengolahan produk hasil peternakan yang ASUH		15	81.489.120	
3.1	Penataan Prasarana Pertanian	Tersedianya penataan Prasarana Pertanian untuk Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis (Dokumen)	Provinsi Jambi	11	2.204.655.350	Penataan Prasarana Pertanian	1. Meningkatkan pengawasan dan konservasi satwa di kebun binatang (Dokumen)	Provinsi Jambi	2	928.310.150	
							2. Meningkatkan pengawasan dan kesejahteraan satwa di Kebun Binatang (dokumen)	Provinsi Jambi	2	941.721.835	
							4. Meningkatkan pengawasan lahan pertanian (dokumen)	Provinsi Jambi	2	100.865.600	
							5. Meningkatkan Pengawasan, pengolahan dan pemasaran produk hasil peternakan (dokumen)	Provinsi Jambi	2	81.489.120	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)		7	0	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			-	-	
3.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Kordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pndukung Pertanian Lainnya (Laporan)		6	2.026.721.350	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Kordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pndukung Pertanian Lainnya (Laporan)		12	1.870.031.985	
3.1.3	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi (Laporan)		12	91.934.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi (Laporan)		12	100.865.600	
3.1.4	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah Prasarana Pasca Panen Peternakan yang dikendalikan dan di manfaatkan (Unit)		12	86.000.000	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah Prasarana Pasca Panen Peternakan yang dikendalikan dan di manfaatkan (Unit)		1	81.489.120	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase Meningkatnya keswan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan komoditas peternakan strategis di Prov. Jambi (%)		12	1.097.343.353	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)(%)		77	331.907.000	
							2. Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor kontrol veteriner)		56	160.093.000	
							3. Pesentase pemeriksaan sampel kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		77	295.076.000	
4.1	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	Jumlah wilayah pelayanan kesehatan hewan (Kab/Kota)	Provinsi Jambi	11	391.222.000	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	1. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, pemberantasan dan pelayanan kesehatan hewan (dokumen)	Provinsi Jambi	2	180.941.000	
4.1.1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang Mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)		12	391.222.000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang Mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)		12	180.941.000	
4.2	Pengawasan Pemasukkan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Hewan dan Produk Hewan yang diawasi (11 Kab/Kota)	Provinsi Jambi	11	135.641.700	Pengawasan Pemasukkan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	1. Meningkatnya pengawasan lalu lintas Hewan dan Produk Hewan (dokumen)	Provinsi Jambi	2	150.966.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2.1	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)		11	135.641.700	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)		11	150.966.000	
4.3	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Terperiksanya sampel kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (sampel)	Provinsi Jambi	3.000	447.343.353	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	1. Meningkatkan pelayanan dan pengujian kesehatan hewan (dokumen)	Provinsi Jambi	2	192.312.334	
							2. Meningkatkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan hewan dan pangan asal hewan (dokumen)	Provinsi Jambi	2	102.763.666	
4.3.1	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Keswan dan Kesmavet (Dokumen)		12	447.343.353	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Keswan dan Kesmavet (Dokumen)		12	295.076.000	
4.4	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Provinsi Jambi	21	123.136.300	Kesejahteraan Hewan	1. Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (dokumen)	Provinsi Jambi	2	160.093.000	
4.4.1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner [Sertifikat]		7	123.136.300	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner [Sertifikat]		7	160.093.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (%)	Persentase luas aral pengendalian dan penanggulangan bencana OPT (%)		10	600.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (%)	1. Persentase penanganan bencana pertanian (%)		81,94	838.458.000	
							2. Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian (%)		13,07	38.798.000	
5.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Propinsi	Terkendalinya wilayah yang terdampak serangan OPT,Perubahan Iklim (DPI), Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kab/Kota)	Provinsi Jambi	11	600.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Propinsi	1. Meningkatnya serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura yang dapat di kendalikan terhadap luas serangan OPT (dokumen)	Provinsi Jambi	2	838.458.000	
5.1.1							2. Meningkatnya DPI yang tertangani terhadap luas terkena pada tanaman pangan dan hortikultura (dokumen)	Provinsi Jambi	2	38.798.000	
5.1.3	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)		3.088	457.507.620	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)		3088,26	838.458.000	
5.1.4	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)		2.318	70.492.380	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)		2317,65	38.798.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan (Ha)		50	36.000.000	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan (Ha)		-	-	
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)		12	36.000.000	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)		-	-	
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prsentase Kelembagaan Pertanian yang meningkt kapasitasnya (%)		2	500.000.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase Peningkatan Kapasitas SDM petani		0,22	302.176.200	
							2. Persentase peningkatan pembinaan dan pendampingan Kelembagaan Ekonomi Petani		0,35		
6.1	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian (Laporan)			114.473.600	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian (dokumen)	Provinsi Jambi	2	-	
6.1.1	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)		25	27.724.000	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)		25	-	
6.1.2	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang Tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)		120	86.749.600	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang Tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)		120	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya penerapan penyuluhan pertanian di Kab/Kota	Provinsi Jambi	11	230.890.800	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1. Meningkatkan pengawasan dan penguatan pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian (dokumen)	Provinsi Jambi	2	235.861.600	
6.2.1							2. Meningkatkan Kapasitas SDM Petani (dokumen)	Provinsi Jambi	2	66.314.600	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)		3	117.341.600	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)		2	66.314.600	
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)		40	113.549.200	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)		25	235.861.600	
6.3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ekonomi pertanian brbasiskawasan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi petani/peternak (11 Kab/Kota)	Provinsi Jambi	11	86.749.600	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ekonomi pertanian brbasiskawasan	Meningkatnya Pembinaan dan Pendampingan Kelembagaan Ekonomi Petani (Dokumen)	Provinsi Jambi	2	-	
6.3.1	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)		11	67.886.000	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)		1	-	

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2026 didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Provinsi Jambi. Pada forum Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat. Hal ini berarti, Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2026 murni berisi program/kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dengan penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Perangkat Daerah melakukan proses penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui modul e-Musrenbang yang menjadi bagian dari sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi (e-Planning). Untuk tahun 2026, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menunggu usulan program/kegiatan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 2.6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Sektor Pertanian Provinsi Jambi Tahun 2026

Sub Sektor Tanaman Pangan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kab/Kota	Target Kinerja	
				2026	2027
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota			
	Penataan Prasarana Pertanian	Peningkatan Produksi Padi dan Jagung			
	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			
		- Pengembangan Padi	1. Kerinci	1.000 Ha	1.500 Ha
			2. Merangin	2.717 Ha	2.717 Ha
			3. Sarolangun	4.300 Ha	4.300 Ha
			4. Batanghari	600 Ha	800 Ha
			5. Ma. Jambi	600 Ha	800 Ha
			6. Tanjab. Timur	11.435 Ha	12.357 Ha
			7. Tanjab. Barat	3.500 Ha	4.000 Ha
			8. Tebo	5.745 Ha	6.005 Ha
			9. Bungo	3.260 Ha	3.260 Ha
			10. Kota Jambi	500 Ha	500 Ha
			11. Kota Sei. Penuh	80 Ha	80 Ha
		- Pengembangan Jagung	1. Kerinci	100 Ha	120 Ha
			2. Merangin	100 Ha	100 Ha
			3. Sarolangun	110 Ha	110 Ha
			4. Batanghari	200 Ha	240 Ha
			5. Ma. Jambi	100 Ha	500 Ha
			6. Tanjab. Timur	674 Ha	715 Ha
			7. Tanjab. Barat	100 Ha	150 Ha
			8. Tebo	714 Ha	754 Ha
			9. Bungo	450 Ha	450 Ha
			10. Kota Jambi	50 Ha	50 Ha
			11. Kota Sei. Penuh	51 Ha	51 Ha
		- Perbanyak benih sumber padi di penangkar	1. Kerinci	150 Ha	200 Ha
			2. Merangin	50 Ha	50 Ha
			3. Sarolangun		
			4. Batanghari		
			5. Ma. Jambi	25 Ha	25 Ha
			6. Tanjab. Timur	100 Ha	150 Ha
			7. Tanjab. Barat	150 Ha	150 Ha
			8. Tebo	115 Ha	115 Ha
			9. Bungo	100 Ha	100 Ha
			10. Kota jambi	10 Ha	10 Ha
			11. Kota Sei. Penuh	6 Ha	6 Ha

Sub Sektor Peternakan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	
				2025	2026
I	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota (%)			
A.	Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan yang sumbernya dari daerah provinsi lain.	Tersedianya pakan ternak yang berkualitas			
a.	Pengadaan Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ekor)			
	-	Pengadaan Ternak dan Unggas			
	- Ternak Sapi		1. Kerinci	100 Ekor	100 Ekor
			2. Merangin	100 Ekor	100 Ekor
			3. Sarolangun	70 Ekor	100 Ekor
			4. Batanghari	165 Ekor	165 Ekor
			5. Ma. Jambi	150 Ekor	200 Ekor
			6. Tanjab. Timur	20 Ekor	20 Ekor
			7. Tanjab. Barat	200 Ekor	200 Ekor
			8. Tebo	60 Ekor	80 Ekor
			9. Bungo	300 Ekor	300 Ekor
			10. Kota Jambi	50 Ekor	50 Ekor
			11. Kota Sei. Penuh	50 Ekor	50 Ekor
	- Ternak Kambing		1. Kerinci	100 Ekor	100 Ekor
			2. Merangin	100 Ekor	100 Ekor
			3. Sarolangun	168 Ekor	180 Ekor
			4. Batanghari	420 Ekor	420 Ekor
			5. Ma. Jambi	200 Ekor	250 Ekor
			6. Tanjab. Timur	50 Ekor	50 Ekor
			7. Tanjab. Barat	300 Ekor	300 Ekor
			8. Tebo	50 Ekor	100 Ekor
			9. Bungo	200 Ekor	200 Ekor
			10. Kota Jambi	100 Ekor	100 Ekor
			11. Kota Sei. Penuh	100 Ekor	100 Ekor
	- Ternak Ayam		1. Kerinci	1.000 Ekor	1.000 Ekor
			2. Merangin	1.000 Ekor	1.000 Ekor
			3. Sarolangun	1.000 Ekor	1.500 Ekor
			4. Batanghari	4.200 Ekor	4.200 Ekor
			5. Ma. Jambi	3.000 Ekor	4.000 Ekor
			6. Tanjab. Timur	1.000 Ekor	1.000 Ekor
			7. Tanjab. Barat	2.000 Ekor	2.000 Ekor
			9. Bungo	1.000 Ekor	1.000 Ekor
			10. Kota Jambi	300 Ekor	300 Ekor
			11. Kota Sei. Penuh	4.000 Ekor	4.000 Ekor
	- Ternak Itik		1. Kerinci	1.000 Ekor	1.000 Ekor
			2. Merangin	1.000 Ekor	1.000 Ekor
			3. Sarolangun	500 Ekor	750 Ekor
			4. Batanghari	1.900Ekor	1.900Ekor
			5. Ma. Jambi	1.500 Ekor	2.000 Ekor
			6. Tanjab. Timur	600 Ekor	600 Ekor
			7. Tanjab. Barat	1.000 Ekor	1.000 Ekor
			9. Bungo	1.000 Ekor	1.000 Ekor
			10. Kota Jambi	500 Ekor	500 Ekor
			11. Kota Sei. Penuh	4.000 Ekor	4.000 Ekor

Sub Sektor Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	
				Tahun 2026	Tahun 2027
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota (%) persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota (%)			
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di 11 kabupaten/kota			
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)			
		- AOTP	1. Kerinci		
			2. Merangin	1.350 ha	1.350 ha
			3. Sarolangun	1.000 Ha	1.000 Ha
			4. Batanghari	780 Ha	1.170 Ha
			5. Ma. Jambi	200 Ha	300 Ha
			6. Tanjab. Timur	1.500 Ha	1.500 Ha
			7. Tanjab. Barat	1.500 Ha	1.500 Ha
			8. Tebo	3818 Ha	3818 Ha
			9. Bungo	1.000 Ha	1.000 Ha
			10. Kota Sei. Penuh	200 Ha	300 Ha
		- AUTS	1. Kerinci	200 ekor	200 ekor
			2. Batanghari	780 Ha	1.170 Ha
			3. Ma. Jambi		
		- Cultivator	1. Kerinci	25 unit	35 unit
			2. Merangin	17 Unit	17 Unit
			3. Sarolangun	24 Unit	24 Unit
			4. Batanghari	45 unit	59 unit
			5. Ma. Jambi	5 Unit	10 Unit
			6. Tanjab. Timur	14 Unit	20 Unit
			7. Tanjab. Barat	10 Unit	10 Unit
			8. Tebo	24 Unit	24 Unit
			9. Bungo	13 Unit	13 Unit
			10. Kota Jambi	15 unit	15 unit
			11. Kota Sei. Penuh	10 Unit	20 Unit
		- Pompa Air	1. Merangin	5 Unit	5 Unit
			2. Sarolangun		
			3. Batanghari	101 Unit	136 Unit
			4. Ma. Jambi	10 Unit	15 Unit
			5. Tanjab. Timur	50 Unit	100 Unit
			6. Tanjab. Barat	10 Unit	10 Unit
			7. Tebo	12 Unit	12 Unit
			8. Bungo		
			9. Kota Jambi	20 unit	20 unit
			10. Kota Sei. Penuh	20 Unit	40 Unit
		- Power Thresher	1. Kerinci	30 unit	40 unit
			2. Merangin	38 Unit	38 Unit

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	
				2025	2026
			3. Sarolangun	20 Unit	20 Unit
			4. Batanghari	45 Unit	59 Unit
			5. Ma. Jambi	4 Unit	6 Unit
			6. Tanjab. Timur	10 Unit	30 Unit
			7. Tebo	27 Unit	27 Unit
			8. Kota Jambi	10 unit	10 unit
			9. Kota Sei. Penuh	8 Unit	16 Unit
		- Mini Transplanter	1. Kerinci	20 unit	30 unit
			2. Merangin	1 Unit	1 Unit
			3. Batanghari	32 Unit	39 Unit
			4. Tebo	Unit4	4 Unit
			5. Kota Sei. Penuh	20 Unit	40 Unit
		- Traktor Roda 4	1. Kerinci	2 unit	4 unit
			2. Merangin	3 Unit	3 Unit
			3. Sarolangun	20 Unit	20 Unit
			4. Batanghari	18 unit	25 unit
			5. Ma. Jambi	3 Unit	6 Unit
			6. Tanjab. Timur	5 Unit	10 Unit
			7. Tanjab. Barat	10 Unit	10 Unit
			8. Tebo	3 Unit	3 Unit
			9. Bungo	5 Unit	5 Unit
			10. Kota Jambi	2 unit	1 unit
			11. Kota Sei. Penuh	2 Unit	4 Unit
		- Hidrotiller	1. Kerinci	30 unit	40 unit
			2. Merangin	12 Unit	12 Unit
			3. Sarolangun	10 Unit	10 Unit
			4. Batanghari	70 unit	105 Unit
			5. Ma. Jambi	2 Unit	4 Unit
			9. Bungo	3 Unit	3 Unit
			11. Kota Sei. Penuh	20 Unit	40 Unit
		- TR 2 Singkal	1. Kerinci		
			2. Merangin	14 Unit	14 Unit
			3. Sarolangun	10 Unit	10 Unit
			4. Batanghari	32 Unit	46 Unit
			5. Ma. Jambi	10 Unit	15 Unit
			6. Tanjab. Timur	13 Unit	20 Unit
			7. Tanjab. Barat	10 Unit	10 Unit
			8. Tebo	20 Unit	20 Unit
			9. Bungo	30 Unit	30 Unit
			10. Kota Jambi	10 unit	10 unit
			11. Kota Sei. Penuh	10 Unit	20 Unit
		- TR 2 Rotary	1. Kerinci	20 unit	30 unit
			2. Merangin	4 Unit	4 Unit
			3. Batanghari	18 Unit	25 Unit
			4. Ma. Jambi	5 Unit	10 Unit
			5. Tanjab. Timur	6 Unit	10 Unit
			6. Tanjab. Barat	10 Unit	10 Unit
			7. Tebo	21 Unit	21 Unit
			8. Bungo	4 Unit	4 Unit
			9. Kota Jambi	10 unit	10 unit
			10. Kota Sei. Penuh	10 Unit	20 Unit

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	
				2025	2026
		- Rice Transplanter	1. Merangin	2 Unit	2 Unit
			2. Sarolangun		
			3. Batanghari	18 Unit	25 Unit
			4. Ma. Jambi	4 Unit	6 Unit
			5. Kota Sei. Penuh	8 Unit	16 Unit
		- Combine Harvester	1. Kerinci	5 unit	6 unit
			2. Merangin	1 Unit	1 Unit
			3. Batanghari	9 unit	16 Unit
			4. Ma. Jambi	4 Unit	8 Unit
			5. Tanjab. Timur	10 Unit	20 Unit
			6. Kota Jambi	4 unit	4 unit
			7. Kota Sei. Penuh	8 Unit	16 Unit

Sub Sektor Hortikultura

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	
				Tahun 2026	Tahun 2027
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota (%)			
	Penataan Prasarana Pertanian	Peningkatan Produksi Cabai dan Bawang			
	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)			
		Pengembangan Kawasan Bawang Merah	1. Kerinci	12 Ha	20 Ha
			2. Merangin	17 Ha	17
			3. Sarolangun	10 Ha	15 Ha
			4. Batanghari	10 Ha	10 Ha
			5. Tanjab. Barat	4 Ha	4 Ha
			6. Tebo	5 Ha	5 Ha
			7. Bungo	20 ha	20 ha
			8. Kota Jambi	5 Ha	5 Ha
			9. Kota Sei. Penuh	10 ha	10 ha
		Pengembangan Kawasan Cabai Merah	1. Kerinci	14 Ha	25 Ha
			2. Merangin	57 Ha	57
			3. Sarolangun	11 Ha	16 Ha
			4. Batanghari	20 Ha	20 Ha
			5. Ma. Jambi	30 Ha	36 Ha
			6. Tanjab. Timur	161 Ha	200 Ha
			7. Tanjab. Barat	50 Ha	50 Ha
			8. Tebo	10 Ha	15 Ha
			9. Bungo	30 ha	30 ha
			10. Kota Jambi	13 Ha	13 Ha
			11. Kota Sei. Penuh	30 ha	30 ha

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Pembangunan nasional ini didukung oleh kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi maju dan kelembagaan yang terkonsolidasi sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkelanjutan.

RPJMN Tahun 2025-2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045, terutama pendapatan perkapita Indonesia yang ditargetkan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income Country/MIC). Pembangunan nasional digambarkan sebagai pembangunan bangsa yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2025-2029 yakni : “Pertanian yang Maju, Mandiri, dan Modern untuk terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas

pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 serta Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029, yaitu :

“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

- 4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
- 5. Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata**, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
- 1. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2045 serta Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) tahun ke depan dalam memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah untuk bidang urusan pertanian adalah :

“Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 dalam memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah untuk bidang urusan Pertanian yaitu :

“Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan Indeks Ketahanan Pangan”.

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jambi diatas, untuk mencapai sasaran daerah dalam meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mempunyai tujuan dan sasarannya yaitu :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2027	2028
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Nilai Tambah Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Secara Berkelanjutan	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) {%}	105,19	105,25
		Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) {%}	130,56	130,72
		Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT) {%}	93,14	93,15

3.3. Program dan Kegiatan

Prioritas pembangunan pertanian Tahun 2026 merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan kelanjutan dari prioritas pembangunan pertanian tahun 2025. Prioritas pembangunan pertanian tersebut ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis serta arah kebijakan yang telah ditetapkan. **Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan**, dengan sasaran yaitu terlaksananya kemandirian pangan di daerah dan kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam serta terlaksananya penyediaan produk pertanian yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. **Penyediaan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan**, dengan sasaran yaitu terlaksananya Penyediaan dan perbaikan Sarana Prasarana pertanian di daerah.

Program dan kegiatan Pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan tahun 2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, Program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perreviangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju 2027

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				46.161.785.245				98.266.091.661
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP Perangkat Daerah		BB	32.698.805.460			BB	44.116.651.661
		Inderks kepuasan masyarakat (indeks)		82				84	
		Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)		71,5				72	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengawasan, Penyediaan, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Capaian Kinerja dan Evaluasi Perangkat Daerah (Dokumen)	Kota Jambi	17	326.695.191	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur Negara	15	1.100.000.000
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dkumen)		8	208.695.191			12	600.000.000
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		4	118.000.000			2	500.000.000
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Meningkatnya Pengawasan, Pelayanan dan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah (Dokumen)	Kota Jambi	2	29.717.021.691	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur Negara	2	39.446.651.661
		2. Meningkatnya Pengawasan dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Perangkat Daerah (Dokumen)	Kota Jambi	2	928.459.200			2	820.000.000
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)		232	29.717.021.691			234	39.446.651.661

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		1	928.459.200			1	820.000.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Meningkatnya Pengawasan dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kota Jambi	2	29.046.550			2	100.000.000
		2. Meningkatnya Pengawasan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah (Dokumen)	Kota Jambi	2	326.809.954			2	400.000.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		12	29.046.550			12	100.000.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12	326.809.954			12	400.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatnya Pengawasan, Pelayanan, dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik Perangkat Daerah (Dokumen)	Kota Jambi	2	846.050.046	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur Negara	2	900.000.000
		2. Meningkatnya Pengawasan, Pelayanan, dan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kota Jambi	2	429.472.828			2	600.000.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	846.050.046			12	900.000.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	429.472.828			12	600.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatnya Pengawasan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Perangkat Daerah (Dokumen)	Kota Jambi	2	95.250.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur Negara	2	450.000.000
		3. Meningkatnya Pengawasan dan Pemeliharaan Gedung Perangkat Daerah (Dokumen)	Kota Jambi					2	300.000.000
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)		148	95.250.000			158	450.000.000
3.27.01.1.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)		2				2	300.000.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		0,38	382.600.000			0,38	6.265.000.000
		2. Persentase Peningkatan Produksi hortikultura		0,45	696.800.000			0,45	11.635.000.000
		3. Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		0,6	4.695.280.480			0,6	8.600.000.000
		4. Persentase Peningkatan Populasi Ternak		0,8	1.940.395.600			0,8	8.000.000.000
		5. Persentase Ketersediaan sarana pertanian		50				55	
		6. Persentase Peningkatan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai standard		17	353.600.000			17	900.000.000
		7. Persentase Ketersediaan Benih Sumber Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat		55	663.754.400			60	3.050.000.000
		8. Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak dan Pengolahan Lahan HPT Berkualitas		10	711.654.400			15	1.600.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1. Meningkatnya pengawasan, penyediaan dan sebaran pupuk dan pestisida (dokumen)	Provinsi Jambi	2	179.348.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur Negara	2	800.000.000
		2. Meningkatnya pengawasan penyediaan dan sebaran alat dan mesin pertanian (dokumen)	Provinsi Jambi	2	1.761.047.000			2	7.200.000.000
		3. Meningkatnya pengawasan, penyediaan dan sebaran sarana pendukung produksi tanaman pangan (dokumen)	Provinsi Jambi	2	283.400.000			2	4.475.000.000
		4. Meningkatnya pengawasan, penyediaan dan sebaran sarana pendukung produksi hortikultura (dokumen)	Provinsi Jambi	2	696.800.000			2	11.635.000.000
		5. Meningkatnya pengawasan, penyediaan dan sebaran sarana alat pengolah dan pasca panen hasil pertanian (dokumen)	Provinsi Jambi	2	99.200.000			2	1.790.000.000
3.27.02.1.01.01	Pengawasan sebaran pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pndukung Pertanian (Laporan)		11	1.940.395.600			11	8.000.000.000
3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen)		3	1.079.400.000			3	17.900.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1. Meningkatnya pengawasan peredaran Benih/Bibit Bersertifikat TPH (dokumen)	Provinsi Jambi	2	95.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur Negara	2	270.000.000
		2. Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Benih tanaman pangan dan hortikultura (dokumen)	Provinsi Jambi	2	258.600.000			2	630.000.000
		4. Meningkatnya pengawasan dan penyediaan benih tanaman pangan (dokumen)	Provinsi Jambi	2	596.149.550			2	2.350.000.000
		5.Meningkatnya pengawasan dan penyediaan benih tanaman hortikultura (dokumen)	Provinsi Jambi	2	67.604.850			2	700.000.000
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Srtifikat)		150	353.600.000			175	900.000.000
3.27.02.1.02.07	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benihbersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang Diperbanyak (Batang)		11.000	67.604.850			13.500	700.000.000
3.27.02.1.02.013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang Diperbanyak (Ton)		810	596.149.550			866	2.350.000.000
3.27.02.1.04	Peningkatan ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit ternak dan Tanaman Pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi	1. Meningkatnya pengawasan dan pelaksanaan pembibitan ternak (dokumen)	Provinsi Jambi	2	204.506.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur Negara	2	480.000.000
		2. Meningkatnya pengawasan dan penyediaan sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (dokumen)	Provinsi Jambi	2	507.148.200			2	1.120.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 02 1.04 04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)		11	711.654.400			11	1.600.000.000
3.27.02.1,07	Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan yang sumbernya dari daerah provinsi lain.	1. Meningkatnya pengawasan, penyediaan dan sebaran Bibit ternak yang berkualitas (dokumen)	Provinsi Jambi	2	4.522.892.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur Negara	2	8.000.000.000
		2. Meningkatnya pengawasan, penyediaan dan sebaran Bibit hijauan pakan ternak yang berkualitas (dokumen)	Provinsi Jambi	2	172.388.080			2	600.000.000
3.27.02.1,07.02	Pengadaan Hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)		100	172.388.080			150	600.000.000
3.27.02.1,07.04	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)		1.065	4.522.892.400			1.076	8.000.000.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B		61	100.865.600			65	680.000.000
		2. Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung		15	1.870.031.985			20	3.300.000.000
		3. Persentase jumlah unit usaha pengolahan produk hasil perternakan yang ASUH		15	81.489.120			15	850.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	1. Meningkatkan pengawasan dan konservasi satwa di kebun binatang (Dokumen)	Provinsi Jambi	2	928.310.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur Negara	2	1.650.000.000
		2. Meningkatkan pengawasan dan kesejahteraan satwa di Kebun Binatang (dokumen)	Provinsi Jambi	2	941.721.835			2	1.650.000.000
		4. Meningkatkan pengawasan lahan pertanian (dokumen)	Provinsi Jambi	2	100.865.600			2	680.000.000
		5. Meningkatkan Pengawasan, pengolahan dan pemasaran produk hasil peternakan (dokumen)	Provinsi Jambi	2	81.489.120			2	850.000.000
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Kordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pndukung Pertanian Lainnya (Laporan)		12	1.870.031.985			12	3.300.000.000
3.27.03.1.01.18	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi (Laporan)		12	100.865.600			12	680.000.000
3.27.03.1.01.19	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah Prasarana Pasca Panen Peternakan yang dikendalikan dan di manfaatkan (Unit)		1	81.489.120			1	850.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)(%)		77	331.907.000			78	1.000.000.000
		2. Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor kontrol veteriner)		56	160.093.000			57	500.000.000
		3. Pesentase pemeriksaan sampel kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		77	295.076.000			78	1.070.000.000
3.27.04.1.01	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	1. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, pemberantasan dan pelayanan kesehatan hewan (dokumen)	Provinsi Jambi	2	180.941.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur Negara	2	700.000.000
3.27.04.1.01.07	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang Mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)		12	180.941.000			12	700.000.000
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukkan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	1. Meningkatnya pengawasan lalu lintas Hewan dan Produk Hewan (dokumen)	Provinsi Jambi	2	150.966.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur Negara	2	300.000.000
3.27.04.1.02.07	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)		11	150.966.000			11	300.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	1. Meningkatkan pelayanan dan pengujian kesehatan hewan (dokumen)	Provinsi Jambi	2	192.312.334	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur Negara	2	695.500.000
		2. Meningkatkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan hewan dan pangan asal hewan (dokumen)	Provinsi Jambi	2	102.763.666			2	374.500.000
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Keswan dan Kesmavet (Dokumen)		12	295.076.000			12	1.070.000.000
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	1. Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (dokumen)	Provinsi Jambi	2	160.093.000			2	500.000.000
3.27.04.1.05.03	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) [Sertifikat]		7	160.093.000			8	500.000.000
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Persentase penanganan bencana pertanian (%)		81,94	838.458.000			82,24	3.188.260.000
		2. Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian (%)		13,07	38.798.000			13,77	2.811.180.000
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Propinsi	1. Meningkatnya serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura yang dapat di kendalikan terhadap luas serangan OPT (dokumen)	Provinsi Jambi	2	838.458.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur Negara	2	3.188.260.000
		2. Meningkatnya DPI yang tertangani terhadap luas terkena pada tanaman pangan dan hortikultura (dokumen)	Provinsi Jambi	2	38.798.000			2	2.811.180.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.05.1.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)		3.088,26	838.458.000			3.188,26	3.188.260.000
3.27.05.1.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)		2.317,65	38.798.000			2.342,65	2.811.180.000
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase Peningkatan Kapasitas SDM petani		0,22	302.176.200			0,24	700.000.000
		2. Persentase peningkatan pembinaan dan pendampingan Kelembagaan Ekonomi Petani		0,35				0,5	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1. Meningkatkan pengawasan dan penguatan pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian (dokumen)	Provinsi Jambi	2	235.861.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur Negara	2	400.000.000
		2. Meningkatkan Kapasitas SDM Petani (dokumen)	Provinsi Jambi	2	66.314.600			2	300.000.000
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)		2	66.314.600			2	300.000.000
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)		25	235.861.600			28	400.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah

4.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ialah program yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dalam berbagai bidang bertujuan untuk Meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Meningkatkan transparansi pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta memenuhi pelayanan administrasi kantor yang kegiatannya meliputi :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4.1.2 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian bertujuan untuk meningkatkan Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Meningkatkan produktivitas pertanian dengan menyediakan sarana produksi yang memadai. Meningkatkan kualitas hasil pertanian dengan menggunakan teknologi dan sarana yang tepat. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan meningkatkan produksi pertanian. Meningkatkan pendapatan petani dengan meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. Serta Meningkatkan kemandirian pangan dengan meningkatkan produksi pertanian lokal. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Sub Kegiatan :

- a. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian;
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan Peredaran Sarana Pertanian.

2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih;
- b. Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang;
- c. Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih;

3. Peningkatan ketersediaan dan Mutu/Bibit ternak dan Tanaman Pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi

Sub Kegiatan :

- a. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi.
4. Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan yang sumbernya dari daerah provinsi lain.
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain;
 - b. Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain.
- 4.1.3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian bertujuan untuk meningkatkan Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pertanian dengan menyediakan prasarana yang memadai. Meningkatkan produktivitas pertanian dengan menyediakan prasarana yang mendukung kegiatan pertanian. Meningkatkan aksesibilitas lahan pertanian dan fasilitas pendukung lainnya. Mengurangi risiko kegagalan panen dan kerugian akibat kurangnya prasarana pertanian. Meningkatkan kualitas hidup petani dengan menyediakan prasarana yang memadai dan mendukung kegiatan pertanian. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 1. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian,
 Sub kegiatan :
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya.
 - b. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkatProvinsi
 - c. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan.
- 4.1.4 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner bertujuan Meningkatkan kesehatan hewan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan komoditas peternakan strategis di Provinsi

serta Mencegah penyebaran penyakit hewan dan zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia). Melindungi kesehatan masyarakat dari risiko penyakit yang dapat ditularkan oleh hewan. Meningkatkan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan. Meningkatkan keamanan pangan asal hewan dengan memastikan bahwa produk hewan yang dikonsumsi manusia aman dan sehat. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan hewan dengan mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kesehatan hewan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi

Sub. Kegiatan :

- a. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2. Pengawasan Pemasukkan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi.

Sub. Kegiatan :

- a. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)

3. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit.

Sub Kegiatan :

- a. Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

4. Kesejahteraan Hewan

Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

4.1.5 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian bertujuan untuk meningkatkan luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT serta Mengurangi risiko bencana pertanian yang dapat

menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial bagi petani dan masyarakat. Meningkatkan ketahanan pertanian terhadap bencana alam dan non-alam, seperti kekeringan, banjir, dan serangan hama. Mengurangi kerugian ekonomi dan sosial akibat bencana pertanian. Meningkatkan kesiapsiagaan petani dan masyarakat dalam menghadapi bencana pertanian. Meningkatkan kemampuan pemulihan pertanian setelah bencana, sehingga produksi pertanian dapat kembali normal.. Adapun kegiatannya sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Provinsi.

Sub Kegiatan :

- a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

- 4.1.6 Program Penyuluh Pertanian

Program Penyuluh Pertanian bertujuan untuk Meningkatkan Peningkatan dan pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN, Swadaya dan Swasta serta Meningkatkan pengetahuan petani tentang teknologi dan inovasi pertanian terbaru. Meningkatkan keterampilan petani dalam mengelola usaha pertanian. Meningkatkan produktivitas pertanian dengan menerapkan teknologi dan inovasi yang tepat. Meningkatkan pendapatan petani dengan meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. Meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat dengan meningkatkan produksi dan pendapatan pertanian.. Adapun kegiatannya sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian.

Sub Kegiatan :

- a. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
- b. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

Tabel 4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2026 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		46.161.785.245
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP Perangkat Daerah	32.669.422.345
		Inderks kepuasan masyarakat (indeks)	
		Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)	327.988.876
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dkumen)	209.988.791
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	118.000.085
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	30.611.477.691
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/buln)	29.717.021.691
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	894.456.000
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Rutinitas Kantor (Laporan)	355.856.504
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	29.046.550
1.3.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	326.809.954
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Jenis)	1.278.849.274
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	846.050.046
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	432.799.228
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	95.250.000
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	95.250.000
1.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	-
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	9.455.727.280
		2. Persentase Peningkatan Produksi hortikultura	
		3. Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	
		4. Persentase Peningkatan Populasi Ternak	
		5. Persentase Ketersediaan sarana pertanian	
		6. Persentase Peningkatan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai standard	

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4
		7. Persentase Ketersediaan Benih Sumber Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat	
		8. Persentase Peningkatan Kelahiran Bibit Ternak Berkualitas	
2.1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengawasan dan Ketersediaan Pemenuhan sarana pertanian terhadap Kebutuhan di tingkat Usaha Tani (Laporan)	3.022.013.200
2.1.1	Pengawasan sebaran pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1.941.319.600
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen)	1.080.693.600
2.2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Laporan Pengawasan, Ketersediaan Benih/Bibit Bersertifikat dan Peredaran Benih/Bibit TPH (Laporan)	1.022.159.200
2.2.1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Srtifikat)	355.078.400
2.2.2	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benihbersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang Diperbanyak (Batang)	67.604.850
2.2.3	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang Diperbanyak (Ton)	599.475.950
2.3	Peningkatan ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit ternak dan Tanaman Pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi	Meningkatnya ketersediaan benih/bibit ternak dan benih/bibit tanaman pakan ternak yang bermutu (Laporan)	715.720.000
2.3.2	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)	715.720.000
2.5	Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan yang sumbernya dari daerah provinsi lain.	Tersedianya Bibit ternak dan pakan ternak yang berkualitas (Dokumen)	4.695.834.880
2.5.1	Pengadaan Hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)	172.388.080
2.5.2	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)	4.523.446.800
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	2.060.148.220
		2. Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung	
3.1	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi serta Dokumen Lahan Pertanian Berkelanjutan (Laporan)	2.060.148.220
3.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Kordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1.876.869.500
3.1.3	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi (Laporan)	101.420.000
3.1.4	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah Prasarana Pasca Panen Peternakan yang dikendalikan dan di manfaatkan (Unit)	81.858.720

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	789.848.000
		2. Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor kontrol veteriner)	
		3. Pesentase pemeriksaan sampel kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	
4.1	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	Jumlah wilayah pelayanan kesehatan hewan (Laporan)	181.310.600
4.1.1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang Mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	181.310.600
4.2	Pengawasan Pemasukkan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah pengawasan lalu lintas Hewan dan Produk Hewan (Kab/Kota)	152.074.800
4.2.1	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	152.074.800
4.3	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Laporan pemeriksaan sampel kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta Pengobatan Hewan Peliharaan (laporan))	296.000.000
4.3.1	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Keswan dan Kesmavet (Dokumen)	296.000.000
4.4	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	160.462.600
4.4.1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) [Sertifikat]	160.462.600
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (%)	1. Persentase penanganan bencana pertanian (%)	882.984.800
		2. Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian (%)	
5.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Propinsi	Jumlah Laporan Penanggulangan Bencana OPT dan Dampak Perubahan Iklim (Laporan)	882.984.800
5.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	843.817.200
5.1.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	39.167.600
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase SDM penyuluh pertanian yang di tingkatkan	303.654.600
		2. Persentase kelembagaan koperasi tani yang di bentuk dan beroperasi	
6.2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (Laporan)	303.654.600
6.2.1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	66.314.600
6.2.2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	237.340.000
6.3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ekonomi pertanian brbasiskawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang di bina dan di dampingi (Unit)	-
6.3.1	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	-

BAB V

PENUTUP

Tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2026 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan berjalan yang berorientasi pada peningkatan produksi pertanian serta dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2026 diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 dapat mensinergikan program dan kegiatan Kabupaten/Kota dan stakeholder yang lain yang mendukung pada pembangunan pertanian di Provinsi Jambi.

Jambi, Oktober 2025

KEPALA DINAS,



Ir. RUMUSDAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19680102 199203 1 007